

BAB IV

PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI PROV. DIY

Kajian tentang kesetaraan gender masuk ke dalam perkembangan kajian keilmuan HI dengan menjadikan individu sebagai aktor penting disamping negara. Ketidaksetaraan gender dapat menurunkan kesejahteraan dan menghambat pembangunan yang akan merugikan masyarakat baik laki-laki, perempuan dan anak-anak yang akan memiliki dampak terhadap kemampuan mereka meningkatkan taraf kehidupan. Ketidaksetaraan gender juga mengurangi produktifitas dalam usaha sehingga mengurangi prospek mengentaskan kemiskinan dan kemajuan ekonomi. Ketidaksetaraan gender dalam laporan ini juga dapat melemahkan pemerintahan suatu negara dan dengan demikian berakibat pada buruknya efektifitas kebijakan pembangunan. Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana pengaruh Pengarusutamaan Gender Internasional terhadap Indonesia khususnya Provinsi DIY.

A. Konsep Pengarus Utama Gender

Pengarusutamaan gender adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan Pengarkontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh proyek, program, dan kebijakan pemerintah (Inpres 9/2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional). Instruksi Presiden No 3/2010 dan beberapa regulasi lainnya dari kementerian mengenai pengarusutamaan gender mengatur lebih jauh upaya-upaya menuju pembangunan yang berkeadilan dan inklusif. Munculnya peraturan-peraturan yang tidak ramah perempuan di tingkat daerah menandai pentingnya penegakan hukum dan kerangka kebijakan pengarusutamaan gender, koordinasi di antara kementerian nasional dan institusi publik di berbagai tingkat, serta replikasi praktek-praktek yang baik.

Berdasarkan definisinya, konsep gender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang di kontruksi secara sosial maupun kultural (Mansour Fakih :8).ⁱ Misalnya bahwa perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Terbentuknya perbedaan gender antara manusia jenis laki-laki dan perempuan karena dibentuk, disosialisasikan, diperkuat dan dikonstruksikan secara sosial atau kultural mealui ajaran keagamaan atau negara.

Ada beberapa teori tentang Gender yang diklasifikasikan sebagai berikut :ⁱⁱ

1. Teori Fungsionalisme yang dicetuskan oleh Miriam Johnson. Ia mengakui bahwa adanya pandangan berat sebelah yang tak sengaja dalam teori Parson tentang keluarga dan kecenderungan fungsionalisme untuk meminggirkan masalah ketimpangan sosial, dominasi dan penindasan. Dalam pandangannya perempuan mengalami kerugian di dalam masyarakat karena pengaruh patriarki yang ada di dalam keluarga.
2. Teori Konflik Analitik yang menganalisis gender berdasarkan perspektif teori konflik yakni Janet Chafetz. Pendekatan yang dilakukannya lintas kultural dan historis dan mencoba merumuskan teori gender di dalam masyarakat dalam pola-pola khusus. Ia menyebutkan bahwa ketimpangan gender berasal dari stratifikasi jenis kelamin. Wanita mengalami kerugian paling sedikit jika dapat menyeimbangkan tanggung jawab rumah tangga dan kebebasan berperan dalam produksi ekonomi secara signifikan.
3. Teori Sistem Dunia, dalam teori ini memandang kapitalisme global di seluruh fase historisnya sebagai sebuah sistem untuk dijadikan sasaran analisis sosiologi. Menurut Kathryn B. Ward sistem dunia tak dapat dipahami kecuali bila tenaga kerja rumah tangga dan sektor informal diperhitungkan dalam analisis dan karena proporsi wanita banyak terdapat di kedua sektor tersebut maka wanita perlu mendapat perhatian khusus.

Pada Konferensi Perempuan IV di Beijing tahun 1995, Platform of Action secara tegas para partisipan mendukung konsep gender mainstreaming dengan menyatakan bahwa pemerintah dan para pengambil keputusan harus terlebih dahulu secara aktif mempromosikan rencana kebijakan-kebijakan dan program yang berspektif gender. Menurut Riant Nugroho (2008) gerakan kaum perempuan pada hakekatnya adalah gerakan transformasi dan bukanlah gerakan untuk membalas dendam kepada kaum lelaki. Artinya gerakan transformasi perempuan adalah suatu proses pergerakan untuk menciptakan hubungan antara sesama manusia (laki-laki dan perempuan) agar lebih baik dan baru yang meliputi hubungan ekonomi, politik, kultural, ideologi, lingkungan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Sementara itu pandangan kritis juga dinyatakan oleh Hillary M. Lips dalam bukunya yang terkenal *Sex & Gender*, yang mendefinisikan bahwa gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectation for women and men*).ⁱⁱⁱ Gender tidak bersifat universal namun bervariasi dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain. Dimana ada dua elemen yang mendasar yakni gender tidak identik dengan jenis kelamin dan gender

merupakan dasar dari pembagian kerja di semua masyarakat (Gallery,1987).^{iv}

Upaya mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan di Indonesia telah dilakukan lebih dari satu dasarwarsa. Terbitnya INPRES No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional menjadi satu titik tolak kebijakan yang sangat penting dalam mendorong upaya tersebut. Kebijakan ini kemudian dipertegas juga dalam Peraturan Presiden No. 5 tahun 201 tentang RPJMN 2010-2014 yang menetapkan gender sebagai salah satu isu lintas bidang yang harus diintegrasikan dalam semua bidang pembangunan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP & PA) menjadi satu lembaga yang diharapkan berperan penting dalam mendukung keberhasilan upaya tersebut melalui fungsi koordinasi, advokasi dan fasilitasi yang dimilikinya.



Diagram 4.1 Kerangka Kinerja Logis PUG

Kesetaraan dan keadilan gender sebagai tujuan pembangunan yang ditandai dengan perbaikan kondisi & relasi laki laki dan perempuan, kesenjangan /isu gender yang masih ditemukan, harus dijawab melalui kebijakan/program/kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang ada (input) yang mensyaratkan adanya kesadaran, komitmen, sumber daya manusia yang terampil, kelembagaan, juga alat alaisa gender.

B. Analisa Pengaruh Pengarus Utamaan Gender di Provinsi DIY

4.1 Dampak Pengarus Utamaan Gender di Provinsi DIY

PUG sebagai sebuah strategi , diterapkan dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, implementasi dan monitoring evaluasi program juga memastikan hasil pembangunan yaitu Pelayanan Publik yang Responsif Gender.¹

¹ Data diambil dari link :

Provinsi dengan Capaian IPG Tertinggi, 2013

Provinsi	IPG
DKI Jakarta	74,96
DI Yogyakarta	74,93
Sumatera Utara	71,16
Kalimantan Tengah	71,13
Sumatera Barat	70,57

Tabel 4.1 Index Pembangunan Gender Tertinggi Tahun 2013

Pengabaian aspek gender akan menghambat proses pembangunan di suatu wilayah. Untuk melihat sejauh mana pembangunan berkontribusi pada penurunan kesenjangan antara laki laki, perempuan dan kelompok gender yang lain, data terpilah menjadi suatu keniscayaan.

Peringkat Tertinggi dan Terendah Rasio IPG terhadap IPM, 2013

Provinsi	IPM	IPG	Rasio (%)
Tertinggi:			
Nusa Tenggara Timur	68,77	66,98	97,39
DI Yogyakarta	77,37	74,75	96,61
Papua	63,25	63,60	96
DKI Jakarta	78,59	74,98	95,41
Maluku	72,70	69,18	95,17
Terendah:			
Kalimantan Utara	74,72	64,49	86,31
Papua Barat	70,62	60,91	86,25
Kep Bangka Belitung	72,29	62,38	83,96
Gorontalo	71,77	59,12	82,37
Kalimantan Timur	77,33	62,93	81,38

Sumber: BPS

Tabel 4.2 Perbandingan Rasio IPG Terhadap IPM Tahun 2013

Data terpilah sangat penting dalam perencanaan, penganggaran, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan/ program/ kegiatan. Dengan data terpilah diharapkan kebijakan/ program/ kegiatan akan tepat sasaran sehingga memberikan manfaat dan dampak yang setara bagi perempuan, laki laki dan kelompok gender yang lain.

Tabel 4.3 Capaian IPG DIY Tahun 2013

Provinsi/ Kabupaten	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Sumbangan Pendapatan		IPG	
	(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Persen)		2012	2013
	L	P	L	P	L	P	L	P		
DI YOGYAKARTA	71,69	75,45	96,78	89,11	9,82	8,86	60,13	39,87	74,11	74,75
Kulon Progo	73,41	77,04	97,71	89,95	9,16	8,07	67,68	32,52	68,41	69,42
Bantul	69,63	73,50	96,53	89,18	9,64	8,86	61,03	38,97	72,6	73,35
Gunung Kidul	69,36	73,25	92,27	79,74	7,85	6,34	61,95	38,05	66,62	67,29
Sleman	73,81	77,41	98,62	92,02	11,20	10,15	62,84	37,16	75,76	76,45
Kota Yogyakarta	71,78	75,53	99,98	97,03	12,11	11,32	56,66	43,34	78,71	79,04

Sumber : BPS, Kementerian PP &PA, 2014

Di tingkat kabupaten/ kota, data yang ada menunjukkan distribusi pencapaian IPG (Index Pembangunan Gender) antara kabupaten/ kota yang bervariasi. Beberapa daerah seperti Kota Yogyakarta menunjukkan pencapaian yang tinggi, yaitu 77,71 pada tahun 2012 dan 79,04 pada tahun 2013. Pencapaian ini menempatkan Kota Yogyakarta dalam peringkat 2 di tingkat nasional baik pada tahun 2012 maupun 2013.

Begitu juga kabupaten Sleman yang IPG nya mencapai 75,76 pada tahun 2012 dan 76,45 pada tahun 2013. Pencapaian ini juga menempatkan kabupaten Sleman pada peringkat 8 di tingkat nasional di tahun 2012 dan peringkat 7 pada tahun 2013.. Kabupaten Bantul pada tahun 2012 dengan pencapaian IPG sebesar 72,6 dan meningkat pada tahun 2013 IPG mencapai 73,35. Namun demikian, dua kabupaten yaitu Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo masih menyisakan catatan serius karena pencapaian IPGnya masih berada di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2013, kabupaten Kulonprogo memiliki IPG sebesar 69,42 masih berada dibawah rata rata IPG nasional sebesar 69,57. Sementara Gunungkidul dengan IPG 67,29 masih jauh dibawah rata rata nasional

Dengan situasi seperti tergambar di atas, disparitas antar wilayah menjadi catatan penting bagi DIY di masa depan. Upaya-upaya yang baru penting untuk dilakukan untuk memperpendek kesenjangan IPM (Index Pembangunan Manusia)) dan IPG, salah satunya dengan menaikkan IPG terutama di kabupaten/ kota dengan pencapaian IPG yang masih rendah seperti di kabupaten Kulonprogo dan Gunung Kidul.

Jumlah Perempuan Anggota DPRD DIY Tahun 2011-2014

Wilayah	2011	2012	2013	2014
Kulonprogo	5	4	4	7
Bantul	7	7	7	3
Gunungkidul	6	6	6	7
Sleman	9	9	9	13
Yogyakarta	5	4	4	10
D.I. Yogyakarta	12	12	12	6
Jumlah	44	42	42	46

Tabel 4.4 Anggota DPRD DIY Perempuan Tahun 2011-2014

Isu gender pada jabatan publik dan aparatur pemerintah terlihat dari kecenderungan dimana semakin tinggi eselon, semakin sedikit jumlah perempuan. Memang hal ini terjadi di tengah catatan positif dimana secara jumlah, pegawai perempuan telah mengalami peningkatan. Dengan kata lain, isunya bisa jadi bukanlah pada fase rekrutment pegawai negeri sipil, namun bagaimana skema pengembangan karir memungkinkan perempuan dan laki-laki mendapatkan kesempatan yang setara untuk berkembang dan menduduki jabatan-jabatan strategis.

Bagaimanakah peningkatan keterwakilan perempuan pada jabatan publik berimplikasi pada peningkatan responsivitas kebijakan terhadap kepentingan perempuan dan kelompok marjinal? Argumentasi yang melandasi pentingnya keterwakilan deskriptif perempuan (yaitu perempuan diwakili oleh perempuan) adalah karena perempuan yang mengerti apa saja aspirasi dan kebutuhan perempuan, sehingga diharapkan akan menjadikan kebijakan yang diambil lebih berpihak pada kepentingan perempuan.

Karenanya, menjadi tantangan untuk membuktikan, bahwa kepemimpinan perempuan memang memberikan warna dalam kebijakan yang diambil, dengan menjadikan kepentingan dan aspirasi perempuan sebagai prioritas dalam kebijakan. Terhadap hal ini, dibutuhkan studi berbasis bukti yang komprehensif untuk menunjukkan, apa saja dan bagaimana responsivitas gender dari kebijakan daerah bisa diwujudkan dengan adanya kepemimpinan perempuan.

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2013, apabila dikaji menurut kabupaten dan kota juga bervariasi. Secara keseluruhan jumlah penduduk perempuan lebih tinggi daripada laki-laki dengan rasio jenis kelamin sebesar 97 persen, berarti terdapat 97 laki-laki dalam 100

penduduk. Menurut kabupaten/kota, rasio jenis kelamin terendah di Kabupaten Gunungkidul (94 persen) dan tertinggi Kabupaten Sleman (100 persen). Semakin rendah rasio jenis kelamin menunjukkan semakin tingginya proporsi jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah. Ini berarti penduduk perempuan di Kabupaten Gunungkidul lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain. Dalam hal ini faktor migrasi keluar penduduk laki-laki menjadi penjas lebih banyaknya penduduk perempuan.

Jumlah penduduk di DIY pada tahun 2014 sebesar 3.637.116 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk jika dilihat dari data tahun sebelumnya tergolong tinggi. Pada tahun 2014 terjadi perubahan untuk proporsi penduduk menurut jenis kelamin. Jika pada tahun sebelumnya persentase laki-laki dan persentase perempuan cenderung sama, akan tetapi pada tahun 2014 persentase laki-laki lebih rendah dibandingkan persentase perempuan. Tercatat pada 2014 persentase penduduk laki-laki di DIY sebesar 49,42 sedangkan persentase perempuan sebesar 50,58. Jika dilihat dengan menggunakan sex ratio, nilainya sebesar 98. Artinya terdapat 98 penduduk laki-laki dari 100 perempuan. Menurut kabupaten/kota, Kabupaten Gunungkidul tetap menjadi kabupaten dengan nilai sex ratio terendah dengan nilai sebesar 94 persen. Sedangkan Kabupaten Sleman juga menjadi kabupaten di DIY dengan nilai sex ratio tertinggi dengan nilai 100.

Menurut kabupaten/kota jumlah rumah tangga pada 2013 bervariasi, tertinggi di Kabupaten Sleman (362.727 RT) dan terendah di Kabupaten Kulonprogo (109.278 RT). Kota Yogyakarta, dengan jumlah penduduk hampir sama dengan Kabupaten Kulonprogo ternyata memiliki jumlah rumah tangga yang lebih besar (136.385 RT). Ini menunjukkan lebih rendahnya jumlah anggota rumah tangga di tiap rumah tangga yang ada di Kota Yogyakarta dibandingkan dengan Kabupaten Kulonprogo.

Jumlah kepala rumah tangga pada 2014 di DIY sebesar 1.110.411 berdasarkan data Susenas 2013 backcasting setelah diolah. Berdasarkan kabupaten/kota, jumlah kepala rumah tangga tertinggi berada di Kabupaten Sleman (374.645 RT) dan terendah berada di Kabupaten Kulon Progo (113.749 RT). Kondisi ini masih sama dengan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya dimana Sleman memiliki jumlah rumah tangga tertinggi di DIY. Berdasarkan jenis kelamin kepala rumah tangga, kepala rumah tangga laki-laki di DIY didominasi oleh kepala rumah tangga laki-laki.

Persentase kepala rumah tangga laki-laki sebesar 80,73 persen sedangkan sisanya (19,27

persen) merupakan kepala rumah tangga perempuan. Terjadi penurunan persentase kepala rumah tangga perempuan pada 2014 dibanding pada 2013. Pada 2014 persentase kepala rumah tangga perempuan sebesar 19,27 persen sedangkan pada 2013 persentasenya sebesar 19,46 persen. Kabupaten dengan prosentase kepala rumah tangga perempuan tertinggi adalah Kota Yogyakarta. Pada tahun 2013, jumlah kepala rumah tangga perempuan di Kota Yogyakarta sebesar 30,4 persen. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 29,89 persen. Persentase perempuan kepala rumah tangga tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain. Kabupaten Bantul dan Gunungkidul adalah dua kabupaten dengan jumlah perempuan kepala rumah tangga terendah berturut-turut 15,8 persen dan 14,4 persen. Fakta ini, menjadi indikator awal adanya potensi persoalan seputar kepala rumah tangga perempuan di Kota Yogyakarta dari pada kabupaten lain. Hal yang penting untuk dicermati adalah potensi kepala rumah tangga perempuan yang telah lansia dan/atau hidup sendiri. Meskipun pada 2014 jumlah persentase kepala rumah tangga perempuan di Kota Yogyakarta mengalami penurunan, akan tetapi prosentasenya masih tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lain di DIY.²

4.2.2 Efek Pengarus Utamaan Gender di Berbagai Bidang

Dalam tingkat kepedulian terhadap problematika Gender, Propinsi DIY merupakan salah satu propinsi yang sangat peduli. Sebagai propinsi yang mendapatkan otonomi khusus dari Pemerintah Republik Indonesia, wilayah ini menganut sistem kesultanan. Dimana kepala pemerintahan di jabat oleh seorang Sultan yang juga merangkap sebagai Kepala Daerah atau Gubernur. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki luas 3.185,80 km² ini terdiri atas satu kota dan empat kabupaten, yang terbagi lagi menjadi 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan. Menurut sensus penduduk 2010 memiliki jumlah penduduk 3.452.390 jiwa dengan proporsi 1.705.404 laki-laki dan 1.746.986 perempuan, serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.084 jiwa per km².

Hasil Sensus Penduduk 2010 mencatat jumlah penduduk DIY mencapai 3.457.491 jiwa, dengan komposisi 49,43 persen laki-laki dan 50,57 persen perempuan. Penduduk tersebut tersebar di lima kabupaten/kota dengan populasi terbesar terdapat di Kabupaten Sleman dan

² Data diambil dari :
<https://dl.dropboxusercontent.com/u/100717025/BUKU%20DATA%20GENDER%202015%20Lengkap.pdf>

diikuti oleh Kabupaten Bantul dan Gunungkidul. Untuk jumlah rumah tangga di DIY ada sebanyak 959.885 yang terdiri dari populasi laki- laki sebanyak 1.568.096 populasi perempuan sebanyak 1.588.133 jiwa, jumlah total penduduk 3.156.229 dengan jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari laki- laki sebanyak 20.037 jiwa (0, 63%). Rasio yang berpendidikan, penduduk perempuan yang tidak/belum pernah sekolah juga lebih banyak dari laki-laki dengan perbandingan masing- masing untuk perempuan 19,92% untuk perempuan dan 8,35% untuk laki-laki.³

Sementara itu, untuk membantu berjalannya roda pemerintahan oleh Kepala Daerah dibentuklah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Grhasia
4. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
7. Badan Lingkungan Hidup
8. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat
9. Dinas Sosial
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11. Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
12. Badan Kerjasama Penanaman Modal
13. Dinas Kebudayaan
14. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
15. Satuan Polisi Pamong Praja
16. Dewan Perwakilan Daerah
17. Sekretariat Daerah
18. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
19. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
20. Badan Pendidikan dan Pelatihan
21. Inspektorat

³ Pusat Studi Islam UII – 10 Juni 2015

22. Badan Kepegawaian Daerah
23. Pejabata Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
25. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
26. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
27. Dinas Pertanian
28. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
29. Dinas Pariwisata
30. Dinas Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan hasil sensus penduduk 1971 jumlah penduduk DIY tercatat sebesar 2,5 juta jiwa kemudian mengalami peningkatan menjadi 2,8 juta jiwa pada tahun 1980. Pada 1990 jumlah penduduk meningkat hingga 2,9 juta jiwa. Peningkatan jumlah kembali terjadi pada tahun 2000 dan 2010 yakni 3,1 juta jiwa dan 3,46 juta jiwa. Ini menunjukkan pertambahan penduduk yang relatif kecil, selama 40 tahun bertambah satu juta jiwa, atau sekitar 25 ribu jiwa pertahun.

Tahun 2013, Proporsi penduduk perempuan dan laki-laki cenderung sama. Pertambahan penduduk terjadi secara seimbang antara laki-laki dan perempuan. Jumlah penduduk antar kabupaten/kota menunjukkan variasi. Pada tahun 2013, jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Sleman yaitu 1.129.164 (32 persen) dan terendah di Kota Yogyakarta (11 persen) dan Kabupaten Kulonprogo (11 persen). Persentase jumlah penduduk di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul secara berturut-turut adalah 26 persen dan 19 persen. Selain jumlah penduduk di Kota Yogyakarta terendah, laju pertumbuhan penduduknya pun terkecil sejak tahun 1990. Pada periode 1990-2000 laju pertumbuhan penduduk Kota Yogyakarta adalah -0,39 persen per tahun. Begitu pula pada periode 2000-2010, laju pertumbuhan penduduk di Kota Yogyakarta tetap terendah pada angka -0,21 persen per tahun. Hal sebaliknya terjadi di Kabupaten Sleman, sejak tahun 1980 – 2010 laju pertumbuhan penduduknya selalu paling tinggi di DIY

4.2.1 Pembangunan Gender di Bidang Lingkungan Provinsi DIY

Sejalan dengan upaya pembangunan berkelanjutan, terdapat tiga matra pembangunan yang saling terintegrasi satu sama lain. Ketiga matra ini saling dukung dan sama pentingnya

demikian mewujudkan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan. Ketiga matra tersebut adalah matra ekonomi, matra kependudukan, dan matra lingkungan. Logikanya sederhana, keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi akan mendukung keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan dan pada akhirnya pembangunan lingkungan juga akan baik. Poros titik awal juga dapat dimulai baik dari lingkungan maupun kependudukan. Ini berarti keberhasilan pada matra kependudukan akan mempengaruhi keberhasilan bidang lingkungan dan akhirnya ekonomi akan berhasil baik, begitu pula jika memulainya dari lingkungan. Prinsip operasionalnya adalah bahwa ketiga matra tersebut tidak terpisah bagaikan rantai yang saling sambung.

Upaya pelestarian telah banyak dilakukan oleh wadah perempuan peduli lingkungan. Berbagai aliansi atau wadah sebagai gerakan masyarakat yang peduli pada lingkungan antara lain UKM Mekar (pengelolaan/pemanfaatan sampah), UKM IBS (pemanfaatan sampah), ASRI (pengelolaan sampah), Bank Sampah Salingsih, Kelompok Wanita Tani An Naba, PKK, Dharma Wanita Persatuan dan masih banyak lagi. Total jumlah wadah perempuan yang peduli lingkungan di DIY sebanyak 30 buah. Berdasarkan data dari BLH Yogyakarta/LSM, jumlah ini terus bertambah hingga mencapai 40 unit wadah perempuan peduli lingkungan pada tahun 2014. Selain terkait dengan sampah, perhatian pemerintah DIY terhadap berbagai bencana juga sangat baik.

Tanggap bencana, utamanya terhadap perempuan dan anak telah dilakukan dengan baik Melalui BLH dan LSM. Beberapa kejadian bencana yang menjadi perhatian pemerintah DIY adalah gunung meletus, gempa bumi, banjir, tsunami, tanah longsor, dan angin puting beliung. Pada tahun 2014, jumlah bencana di DIY tercatat tidak terlalu banyak. Pada bencana banjir bandang terdapat 2 orang laki-laki yang meninggal. Pada bencana longsor 1 orang laki-laki menjadi korban meninggal. Demikian halnya dengan kejadian bencana puting beliung yang memakan 1 korban laki-laki yang meninggal, 1 anak perempuan luka-luka, dan 2 laki-laki dan 2 perempuan yang luka-luka.⁴

4.2.2 Pembangunan Gender di Bidang Ekonomi dan Ketenaga Kerjaan Provinsi DIY

Penduduk yang berpartisipasi dalam pasar kerja dari tahun 2011 sampai 2012 mengalami peningkatan yaitu dari sejumlah 1,57 juta menjadi 1,64 juta . Perubahan sekitar 100 ribu dalam

⁴ Ibid

waktu satu tahun merupakan perubahan yang cukup tinggi. Peningkatan tersebut terus berlanjut sampai 2013 dimana jumlahnya menjadi 1,95 juta. Tren positif tersebut berubah pada tahun 2014 dimana angkanya menurun menjadi 1,74 juta. Apabila dilihat berdasarkan perbedaan jenis kelamin, tingkat partisipasi perempuan secara keseluruhan di setiap Kabupaten/Kota di DIY, memang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Pekerja di sektor formal secara umum mengalami peningkatan dari 962.118 pekerja di tahun 2011 menjadi 973.237 di tahun 2012. Perbandingan pekerja di sektor formal antara laki-laki dengan perempuan di tahun 2012 adalah 57,9 persen berbanding dengan 42,1 persen. Sedangkan pada 2014 perbandingan pekerja laki-laki dan perempuan di sektor formal menjadi 60,49 persen dan 39,51 persen. Untuk pekerja di sektor informal, jumlah pekerja mengalami sedikit kenaikan dari 894.471 pekerja di tahun 2012, menjadi 113.4557 pekerja pada tahun 2013. Namun demikian, jumlah pekerja laki-laki masih mendominasi sektor informal DIY di tahun 2013 dengan persentase 59,77 persen. Sedangkan pada 2014, jumlah pekerja di sektor informal mengalami penurunan menjadi 1.034.397 jiwa dimana jumlah pekerja laki-laki di sektor informal mengalami penurunan. Pada tahun 2014, dari 5 Kabupaten/kota di DIY,

Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta yang memiliki pekerja perempuan lebih dominan dibandingkan dengan laki-laki di sektor informalnya. Peran sektor informal ini sangat strategis karena dirasa dapat berperan sebagai katup pengaman pengangguran bagi perempuan di DIY. Angka penganggur terbuka di DIY relatif tetap pada angka yang sama yaitu 3,35% pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 menjadi 3,33 persen. Penganggur perempuan menurun secara nyata dari 4,08 persen di tahun 2011 menjadi 2,65 pada 2014. Hal ini tidak terjadi pada penganggur laki-laki yang angkanya fluktuatif dalam empat tahun terakhir. Analisis angkatan kerja berhubungan dengan kondisi perekonomian. Tingkat dan pola partisipasi angkatan kerja berkaitan dengan ketersediaan kesempatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan besaran rasio antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja.

Pada tahun 2014, partisipasi kerja laki-laki yaitu 335.734 jiwa lebih tinggi dibanding perempuan yaitu 226.875 jiwa. Apabila dilihat berdasarkan perbedaan jenis kelamin, tingkat partisipasi perempuan secara keseluruhan di setiap Kabupaten/Kota di DIY, memang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Kondisi partisipasi kerja tahun 2014 juga tidak menunjukkan perubahan yang drastis, angkatan kerja lulusan SMA masih tetap mendominasi tingkat partisipasi kerja di DIY. Partisipasi kerja penduduk Kabupaten Sleman

didominasi oleh penduduk lulusan SMA ke atas. Sementara itu partisipasi kerja di Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh penduduk yang berpendidikan SMP ke bawah.

Teori segmentasi pasar tenaga kerja yang dikemukakan oleh Chiplin dan Sloane (1982), menunjukkan bahwa perempuan dianggap sebagai pekerja sekunder tidak memiliki jaminan terhadap kestabilan kerja, memiliki kompensasi yang rendah serta tidak memiliki prospek (Hardiani, 1998). Feminisasi kemiskinan dan segmentasi pasar tenaga kerja ini membuktikan masih adanya ketidaksetaraan gender yang dialami perempuan. Tercatat partisipasi perempuan terhadap total penduduk yang masuk dalam pasar kerja adalah 42,1 persen di tahun 2011, menurun menjadi 41,6 persen di tahun 2012. Angka partisipasi perempuan di DIY menunjukkan ritme yang fluktuatif, karena pada tahun 2013 angka partisipasi perempuan tercatat meningkat menjadi 45 persen. Namun pada tahun 2014, kembali menurun menjadi 41,8 persen.

Dalam konsep Susenas, yang masuk dalam sektor formal adalah mereka yang bekerja dengan status usaha sebagai buruh atau karyawan dengan jumlah jam kerja tetap, ada upah dan gaji yang jelas, serta ada keterikatan dan aturan yang jelas dalam bekerja. Sektor informal adalah mereka yang bekerja dengan status selain sebagai buruh atau karyawan dengan jumlah jam kerjanya tidak tetap dan tidak ada keterikatan tertentu untuk memasuki suatu usaha (tidak ada ikatan dan mudah ganti pekerjaan). Pekerja di sektor formal secara umum mengalami peningkatan dari 962.118 pekerja di tahun 2011 menjadi 973.237 di tahun 2012. Perbandingan pekerja di sektor formal antara laki-laki dengan perempuan di tahun 2012 adalah 57,9 persen berbanding dengan 42,1 persen. Perbandingan ini semakin kontras di Kabupaten Gunungkidul yakni 64,1 persen untuk pekerja laki-laki dibandingkan dengan 35,8 persen untuk perempuan. Ini menunjukkan bahwa pekerja di sektor formal di Kabupaten Gunungkidul untuk laki-laki jauh lebih dominan. Pada tahun 2013, terjadi penurunan jumlah pekerja di sektor formal dari 973.237 jiwa di tahun 2012, menjadi 751.514 jiwa. Pada tahun 2014, jumlah penduduk DIY yang bekerja di sektor formal mengalami peningkatan menjadi 921.646 jiwa. Perbandingan pekerja di sektor formal antara laki-laki dengan perempuan di tahun 2013 adalah 47,3 persen berbanding dengan 52,7 persen.

Perempuan pada 2013 lebih banyak terjun di sektor formal dibandingkan dengan laki-laki. Perbandingan ini semakin kontras di Kabupaten Sleman yakni 30,3 persen untuk pekerja laki-laki dibandingkan dengan 69,7 persen untuk perempuan. Penduduk perempuan yang

bekerja di sektor formal mengalami penurunan pada tahun 2014. Perbandingan pekerja laki-laki dan perempuan di sektor formal menjadi 60,49 persen dan 39,51 persen. Partisipasi perempuan pada sektor formal tahun 2014 lebih rendah dibandingkan laki-laki, kecuali di Kabupaten Kulonprogo dimana sekitar 50,04 persen perempuan bekerja di sektor formal.

Untuk pekerja di sektor informal, jumlah pekerja mengalami sedikit kenaikan dari 894.471 pekerja di tahun 2012, menjadi 113.4557 pekerja pada tahun 2013. Pada tahun 2014 jumlah pekerja di sektor informal mengalami penurunan menjadi 1.034.397 jiwa. Terjadi peningkatan pekerja laki-laki dan perempuan pada tahun 2013. Sementara itu, pada tahun 2014 jumlah pekerja laki-laki mengalami penurunan, sedangkan jumlah pekerja perempuan mengalami peningkatan. Namun demikian, jumlah pekerja laki-laki masih mendominasi sektor informal DIY di tahun 2013 dengan persentase 59,77 persen. Pada tahun 2014, pekerja laki-laki masih mendominasi sektor informal di secondary jobs Pekerja Menurut Sektor Formal dan Informal DIY dengan persentase 50,84 persen. Pada tahun 2014, dari 5 Kabupaten/kota di DIY, Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta yang memiliki pekerja perempuan lebih dominan dibandingkan dengan laki-laki di sektor informalnya. Peran sektor informal ini sangat strategis karena dirasa dapat berperan sebagai katup pengaman pengangguran bagi perempuan di DIY. Keberadaan dan kelangsungan kegiatan sektor informal, dalam sistem ekonomi kontemporer sesungguhnya bukanlah gejala negatif. Ia hadir dan tumbuh sebagai realitas ekonomi kerakyatan yang berperan cukup penting dalam pengembangan masyarakat dan pembangunan nasional.

Setidaknya, ketika program pembangunan kurang mampu menyediakan peluang kerja bagi angkatan kerja perempuan di DIY, sektor informal dengan segala kekurangannya mampu berperan sebagai penampung dan alternatif peluang kerja bagi para pencari kerja, khususnya pekerja perempuan.⁵

4.2.3 Pembangunan Gender di Bidang Pekerja Umum dan ESDM Provinsi DIY

Tujuan umum dari PUG-PU adalah memastikan bahwa penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PU dan pemukiman telah responsive gender, artinya tidak ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat dari hasil-hasil pembangunan infrastruktur PU dan pemukiman serta dalam meningkatkan partisipasi dan ikut

⁵ Ibid

mengontrol proses pembangunan infrastruktur PU dan pemukiman^v. Tujuan khusus yakni :

1. Memastikan bahwa seluruh jajaran Dinas PUP-ESDM DIY telah memahami konsep, prinsip dan strategi pelaksanaan PUG dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PU dan Pemukiman.
2. Memastikan bahwa seluruh penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PU dan Pemukiman responsive gender.
3. Memastikan adanya berkelanjutan , pelestarian dan pengembangan kualitas penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan infrastruktur PU dan pemukiman.

Sasaran pelaksanaan PUG Terintegritasnya perspektif gender ke dalam internal budaya Dinas PUP-ESDM DIY sehingga menghasilkan budaya lembaga yang peka terhadap isu gender, antara lain :

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan staf Dinas PUP-ESDM DIY untuk melaksanakan PUG di bidang tugasnya.
 2. Pelaksanaan pembinaan SDM yang responsif gender.
 3. Penyediaan prasarana dan sarana gedung Dinas PUP-ESDM DIY yang responsif gender

Terintegritasnya perspektif gender ke dalam seluruh proses penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PU dan Pemukiman sehingga menghasilkan infrastruktur PU dan Pemukiman yang responsif gender :

1. Tahap perencanaan dan pemograman
2. Tahap pelaksanaan
3. Tahap pemantauan dan evaluasi

Program pembangunan berbasis gender yang sudah dilakukan Dinas PU dan ESDM DIY:

1. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
2. Peningkatan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dan pengelolaan irigasi partisipatif (WISMP)-Loan
3. Penyediaan air baku
4. Pembangunan infrastruktur perkotaan
5. Pembangunan infrastruktur pedesaan
6. Pengembangan sistem distribusi air minum
7. Penyediaan prasarana dan saranaair limbah

8. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni
9. Peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas (PSU) kawasan kumuh
10. Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan

Bentuk standarisasi pembnagunan berbasis gender yakni Peraturan Gubernur DIY No 116 tahun 2014 tentang pedoman perencanaan dan penganggaran responsif gender. Kendala yang ditemukan selama proses pelaksanaan pembangunan berbasis gender :

1. Minimnya ketersediaan data pilah
2. Pemahaman PUG-ARG-GBS-GAP
3. Metode/Tools monitoring dan evaluasi
4. Manfaat PPRG dalam penajaman kualitas perencanaan, penganggaran dan perbaikan layanan publik belum dirasakan secara nyata
5. Belum optimalnya efektivitas koordinasi kelembagaan PPRG
6. Belum memadainya perangkat pendukung PPRG

Contoh proyek fisik yang sudah berhasil dilakukan dalam pembangunan berbasis gender di DIY :

1. Kamar mandi/WC terpisah antara laki-laki dan perempuan
2. Jalan akses untuk orang berkebutuhan khusus
3. Ruang pengasuhan anak (RPA) bagi karyawan DPUP-ESDM DIY
4. Meja kerja kantor (depan tertutup)

Bentuk koordinasi dengan kabupaten/kota yakni melalui rapat koordinasi kab/kota.

4.2.4 Pembangunan Gender di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi DIY

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Badan ini merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :⁶

⁶ <https://dl.dropboxusercontent.com/u/100717025/LAKIP%20BPPM%202014.pdf>

**STRUKTUR ORGANISASI
BPPM DIY**

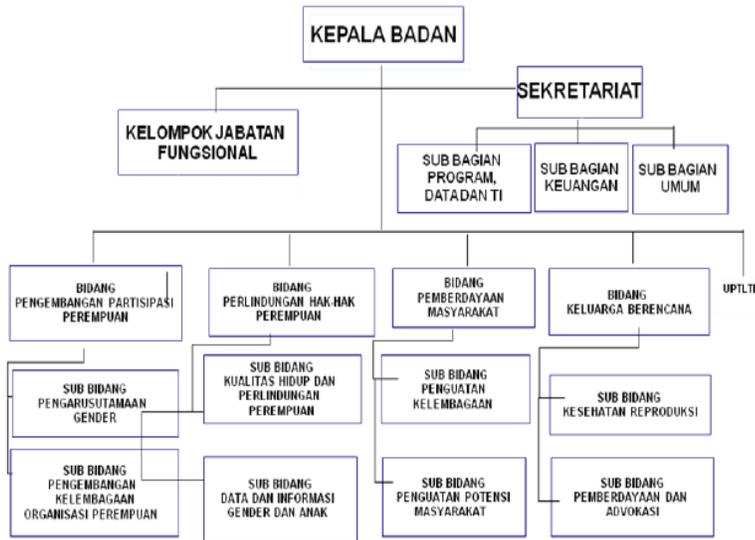


Diagram 4.2 Struktur Organisasi BPPM DIY

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY memiliki fungsi :

- a. Penyusunan program kerja pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan keluarga berencana serta masyarakat;
- b. Penyusunan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan keluarga berencana serta masyarakat;
- c. Pengembangan partisipasi dan potensi perempuan;
- d. Penyelenggaraan perlindungan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan;
- e. Penyelenggaraan pengarusutamaan gender;
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan organisasi perempuan dan lembaga yang peduli terhadap perempuan;
- g. Fasilitasi dan advokasi keluarga sejahtera, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- h. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- i. Pemberian fasilitas di pemberdayaan perempuan Kabupaten/Kota;
- j. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang pemberdayaan

perempuan, keluarga sejahtera, dan keluarga berencana serta masyarakat

- k. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan;
- 1. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas fungsinya.

Visi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Daerah Istimewa Yogyakarta yang tertuang dalam Rencana Strategis BPPM tahun 2012 –2017 adalah “BPPM Mendukung terciptanya Kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan dan anak menuju masyarakat yang partisipatif, sejahtera dan berbudaya”. Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 3 misi yang terdiri dari: (a) Terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui kesetaraan gender (b) Mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas dan (c) Meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat.⁷

Peraturan/kebijakan Nasional terkait dengan Perlindungan Perempuan dan Anak :

- 1. UU PKDRT (UU No. 23 Tahun 2004)
- 2. UU Pornografi (UU No.4 Tahun 2008)
- 3. UU Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014)
- 4. PERPU PKDRT No.1 Tahun 2016 (Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2004)

⁷ Data diambil dari <https://dl.dropboxusercontent.com/u/100717025/LAKIP%20BPPM%202014.pdf>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2012)	TARGET AKHIR (2017)
1	Meningkatkan partisipasi perempuan	Persentase partisipasi perempuan di ranah publik	%	N / A	38,12
2	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak	Persentase cakupan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	N / A	0,041
3	Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG dan PUHA	Persentase kualitas kelembagaan PUG dan PUHA	%	37,64	100
4	Meningkatkan partisipasi pasangan usia subur sebagai akseptor keluarga berencana	Persentase cakupan peserta KB Aktif	%	71,36	80,224
5	Meningkatkan Akses kesehatan reproduksi remaja	Persentase penurunan pernikahan usia dibawah 20 tahun	%	0,530	0,500
6	Meningkatkan tahapan keluarga sejahtera	Persentase tahapan keluarga sejahtera	%	45,83	43,00
7	Meningkatkan ketahanan dankesejahteraan keluarga	Persentase lembaga bina keluarga berkatagori percontohan	%	21,47	24,27
8	Meningkatkan kualitas lembaga pemberdayaan masyarakat	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat berprestasi	%	N / A	31,57
9	Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat	Persentase usaha ekonomi desa	%	24,76	46,94
10	Meningkatkan pemberdayaan lembaga masyarakat pedesaan	Persentase Pembinaan dan pendampingan lembaga masyarakat	%	28,54	100,00

Sumber data: Renstra BPPM

Tabel 4.5 Target BPPM DIY Hingga Tahun 2017

Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini mengampu 3 (tiga) urusan wajib yaitu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Capaian Kinerja Tahun 2014

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Realisasi	Kriteria / Kode
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan partisipasi perempuan	Persentase partisipasi perempuan diranah publik	Persen	47,91	48.04	100.27	Sangat Baik
2	Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase cakupan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	0,044	0.43	102.33	Sangat Baik
3	Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG dan PUHA	Persentase kualitas kelembagaan PUG dan PUHA	Persen	62,64	62.64	100	Sangat Baik
4	Meningkatkan partisipasi pasangan usia subur sebagai akseptor keluarga berencana	Persentase cakupan peserta KB aktif	Persen	71,60	80.05	111.80	Sangat Baik
5	Meningkatkan Akses kesehatan reproduksi remaja	Persentase penurunan pernikahan usia dibawah 20 tahun	Persen	0,515	0.890	57.87	Rendah
6	Meningkatkan tahapan keluarga sejahtera	Persentase tahapan keluarga sejahtera	Persen	44,60	45.24	98.59	Sangat Baik
7	Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase lembaga bina keluarga berkategori percontohan	Persen	22,13	23.28	105.20	Sangat Baik
8	Meningkatkan Kualitas Lembaga pemberdayaan masyarakat	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat berprestasi	Persen	27,96	27.96	100.00	Sangat Baik
9	Meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase usaha ekonomi desa	Persen	33,08	46.53	140.66	Sangat Baik
10	Meningkatkan pemberdayaan lembaga masyarakat pedesaan	Persentase Pembinaan dan pendampingan lembaga masyarakat	Persen	55,00	66.44	120.8	Sangat Baik

Tabel 4.6 Hasil Kinerja BPPM DIY Tahun 2014

Berdasarkan tabel tersebut diatas terdapat 10 sasaran strategis yang terbagi kedalam 10 indikator. Ada 3 indikator yang apabila tingkat capaiannya semakin menurun semakin baik karena target sampai akhir RPJMD adalah menurunkan angka. Indikator tersebut

adalah Persentase cakupan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan persentase realisasi 102,33% , Persentase penurunan pernikahan usia dibawah 20 tahun dengan persentasi realisasi 57,87 % dan Persentase tahapan keluarga sejahtera dengan persentase realisasi 98,59%. Terdapat 2 indikator yang telah memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 100% yaitu Persentase kualitas kelembagaan PUG dan PUHA dan Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat berprestasi, bahkan ada 4 indikator yang capainnya melebihi dari target yang telah ditetapkan dengan persentase capaian lebih dari 110%.

Peraturan/kebijakan Nasional terkait dengan Keluarga Berencana dan Sejahtera

1. UU Perkembangan Kependudukan & Pembangunan Keluarga (UU No.52 Tahun 2009)
2. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006)

Peraturan/kebijakan Daerah terkait dengan Perlindungan Perempuan dan Anak :

1. Pergub DIY No.31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga
2. Pergub DIY No.53 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak
3. Perda No. 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak korban Kekerasan
4. Perda No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas
5. Perda No. 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Thd Korban TPPO
6. Surat edaran gubernur No.10 Tahun 2013 Tentang Penyediaan Fasilitas Menyusui dan/atau memerah ASI
7. Pergub DIY No.73 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi BPPM

4.2.5 Pembangunan Gender di Bidang Sosial Provinsi DIY

Anak berkebutuhan khusus, satu fenomena yang semakin penting untuk menjadi perhatian dalam pembangunan di berbagai sektor. Karena kondisinya, mereka memerlukan pemenuhan kebutuhan yang berbeda, sekaligus perlindungan dan pengakuan bahwa kekhususan mereka tidaklah berarti mereka lebih rendah derajatnya, ataupun bisa dilecehkan. Isu ini juga penting menjadi perhatian, karena banyak kasus anak dengan disabilitas yang disembunyikan karena dianggap sebagai aib bagi keluarganya. Apapun

kondisinya, mereka adalah anak yang melekat kepadanya hak-hak dasar yang tidak bisa dicabut.

**Jumlah ABK Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota
tahun 2014**

Wilayah	ABK Laki-Laki	ABK Perempuan
Kulonprogo	225	169
Bantul	705	595
Gunungkidul	271	212
Sleman	827	610
Yogyakarta	336	339
D.I. YOGYAKARTA	2.364	1.925

Sumber Dikpora DIY

Tabel 4.7 ABK di Kabupaten/Kota DIY tahun 2014

Jumlah anak dengan disabilitas di DIY yang dilaporkan pada tahun 2011 adalah sebanyak 3.975 anak. Jumlahnya kemudian menjadi 4.296 pada tahun 2012, dan 4.289 pada tahun 2013 dan juga tahun 2014. Dilihat dari sebarannya, terbanyak berada di kabupaten Sleman sebanyak 1437 anak, diikuti Bantul sebanyak 1.300 anak, kota Yogyakarta sebanyak 675 anak, Gunungkidul sebanyak 483 anak dan 394 anak di kabupaten Kulon Progo, Apabila di pilah menurut jenis kelamin, maka jumlah ABK laki-laki lebih banyak dibandingkan ABK perempuan.

Dari total sebanyak 4289 ABK, sebanyak 2364 adalah ABK laki-laki dan 1.925 ABK perempuan. Sedangkan bila dilihat jenis disabilitasnya, maka jumlah terbanyak adalah ABK Tuna Grahita. Pada tahun 2014, terdata sebanyak 2.927 ABK Tuna Grahita, dengan rincian sebanyak 1.593 laki-laki dan 1.334 perempuan. Di bawahnya terdapat ABK tuna rungu dengan jumlah 794 anak (413 laki-laki dan 381 perempuan), serta anak dengan autisme sebanyak 270 anak (186 laki-laki dan 84 anak perempuan).

Dengan melihat bahwa angka anak dengan disabilitas adalah cukup tinggi dan menimbang bahwa bagaimanapun kondisinya, mereka berhak untuk mendapatkan pelayanan publik yang layak dan memadai, maka ini menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan. Demikian juga bagi sektor kesehatan, membuat munculnya kebutuhan untuk penyediaan layanan kesehatan untuk mengakomodasi kebutuhan dan menjawab hak anak dan orang dengan disabilitas. Secara keseluruhan, terdapat 121 Puskesmas yang memberikan pelayanan kepada

ABK, dan 65 rumah sakit yang juga memiliki pelayanan yang sama. Untuk Puskesmas, jumlah terbanyak ada di kabupaten Bantul, sementara untuk RS, terbanyak ada di kabupaten Sleman. Tidak tersedia klinik yang memberikan pelayanan bagi ABK di kelima kabupaten/ kota.

C. Review Penelitian

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan konsep Gender di pemerintahan, namun tentunya dengan konsep, dimensi dan indikator yang berbeda-beda. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Chusnul Hayati (2006), dimana peneliti melihat Gender dan Perubahan Ekonomi : Peranan Perempuan Dalam Industri Batik di Yogyakarta 1900-1965. Peneliti menemukan bahwa kemerosotan ekonomi di DIY pada abad ke-19 telah membuat perempuan mengambil posisi untuk pencari nafkah melalui kerajinan batik.

Sementara penelitian ke-dua yang dilakukan oleh Mufidah Ch (2007), dimana peneliti melihat Rekonstruksi Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam konteks Sosial, Budaya dan Agama. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan berbagai macam hal sosial terkait Bias Gender yakni Realitas ketidakadilan sosial di masyarakat, termasuk di dalamnya ketidakadilan gender terabaikan karena norma yang dibangun atas nama tafsir agama tidak dapat dipertemukan dengan realitas umat beragama.

Penelitian ke-tiga yang dilakukan oleh Fahriah Tahar (2007), dimana peneliti melihat Pengaruh Diskriminasi Gender dan Pengalaman Terhadap Profesionalisme Auditor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi gender berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profesionalitas auditor, sedangkan pengalaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap profesionalitas auditor.

Penelitian ke-empat yang dilakukan oleh Farida Hanum (2010), dimana peneliti mengkaji Analisis Kesetaraan Gender di Pemerintahan Kabupaten Sleman DIY. Perbedaan intensitas dan ekstensitas dalam mengarusutamakan gender ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di K/L, provinsi, kabupaten/kota sehingga bias gender maupun netral gender masih mewarnai beberapa dimensi pembangunan.

Penelitian kelima oleh Yuni Lestari (2008) Persepsi dan Partisipasi Anggota DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Kesetaraan Gender. Persepsi anggota DPRD Propinsi DIY terhadap kesetaraan gender merupakan interpretasi dari suatu situasi eksternal

melalui proses kognitif yang dipengaruhi emosi dalam dirinya yang selanjutnya menghasilkan suatu gambaran unik yang kemungkinan berbeda dari kenyataan/realita yang sebenarnya.

[i] Ibid

[ii] George Ritzer. “Teori Sosiologi Modern”. 2004. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Hlm 407.

[iii] Riant Nugroho. “Gender dan Strategi Pngarus-Utamaannya di Indonesia”. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2011.

[iv] ibid

[v] Hasil wawancara Sekretaris Dinas PU dan ESDM Provinsi DIY.